

# Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet

Erni Panca Kurniasih

Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak,  
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Alamat korespondensi, email: [ernipanca@yahoo.co.id](mailto:ernipanca@yahoo.co.id), HP: 081345773232

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Barat dan untuk membuktikan apakah hipotesis Kuznet tentang kurva U terbalik berlaku di Provinsi Kalbar. Pengujian model dilakukan dengan regresi linear menggunakan data panel tahun 2001–2010, sedangkan untuk mengklasifikasikan wilayah digunakan analisis Klasen Tipologi. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan wilayah. Temuan lainnya membuktikan bahwa hipotesis Kuznet tentang pertumbuhan yang tinggi diiringi juga dengan ketimpangan yang tinggi antar wilayah ternyata tidak berlaku di Provinsi Kalbar.

**Kata kunci:** pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, hipotesis kuznet

## I. LATAR BELAKANG

Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Ketimpangan antar daerah seringkali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan beberapa hal misalnya karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, juga tenaga kerja yang terampil. Di samping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah juga dapat menyebabkan perbedaan kemajuan (pertumbuhan ekonomi) antardaerah (Kuncoro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah dengan arah yang negatif. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga *output* juga meningkat. Bertambahnya *output* akan menambah pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita dan selanjutnya ketimpangan pendapatan antar wilayah akan semakin mengecil. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui mekanisme pusat pertumbuhan di mana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat membawa pengaruh bagi daerah lain baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Jika pertumbuhan di suatu daerah menyebabkan perbedaan antara ke dua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (positif) karena terjadi proses peneteskan ke bawah (*trickling down effect*), sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi imbas yang kurang baik (negatif) karena terjadi proses pengkutuban (*polarization effect*).

Menurut Sjafrizal (2009) ketimpangan pembangunan antar wilayah dipicu oleh beberapa hal antara lain: perbedaan potensi daerah yang sangat besar, perbedaan kondisi demografis dan ketenagakerjaan, dan perbedaan kondisi sosial budaya antar wilayah. Di samping itu kurang lancarnya mobilitas barang dan orang antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan regional. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga

menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underserved Region*) sebagaimana Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

**Tabel 1.**  
**Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan perkapita**  
**Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar**  
**Tahun 2001 - 2010**

| <b>Kabupaten/Kota</b> | <b>Pertumbuhan ekonomi (%)</b> | <b>Pendapatan / kapita (Rp)</b> |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Sambas                | 4.97                           | 5,547,690.85                    |
| Bengkayang            | 7.60                           | 5,116,192.81                    |
| Landak                | 4.06                           | 4,408,113.76                    |
| Pontianak             | 4.76                           | 4,783,235.31                    |
| Sanggau               | 4.80                           | 6,202,432.34                    |
| Ketapang              | 7.81                           | 6,496,492.28                    |
| Sintang               | 4.79                           | 4,950,293.88                    |
| Kapuas Hulu           | 3.21                           | 5,047,238.83                    |
| Sekadau               | 3.23                           | 3,146,639.94                    |
| Melawi                | 3.87                           | 2,635,482.63                    |
| Kayong Utara          | 6.19                           | 4,517,906.41                    |
| Kubu Raya             | 4.09                           | 8,036,797.76                    |
| Kota Pontianak        | 4.90                           | 10,406,266.80                   |
| Kota Singkawang       | 4.90                           | 6,540,482.15                    |
| <b>Kalbar</b>         | <b>4.94</b>                    | <b>5,559,661.84</b>             |

*Sumber: BPS, data diolah kembali, tahun 2012*

Berdasarkan tabel 1 dapat kita lihat bahwa daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari provinsi ternyata memiliki pendapatan perkapita tinggi seperti Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kubu Raya. Ada juga daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah sekaligus memiliki pendapatan perkapita yang rendah pula seperti Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau. Secara keseluruhan pendapatan perkapita antar daerah di Provinsi Kalbar tidak begitu tinggi, hanya beberapa daerah saja yang memiliki pendapatan perkapita tinggi dan merupakan daerah perkotaan. Secara tak langsung ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat daerah perkotaan di Provinsi Kalbar relatif lebih baik. Namun ini juga dapat mencerminkan bahwa pembangunan di Kalbar lebih terfokus pada daerah-daerah tertentu terutama daerah kota yang merupakan konsentrasi penduduk di Kalbar. Di sisi lain terpusatnya pembangunan di daerah perkotaan menyebabkan perbedaan antara daerah semakin menyolok dan berujung pada perbedaan kesejahteraan masyarakat antardaerah.

Pada tahap awal pembangunan, perbedaan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar antar daerah telah mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar daerah. Namun dalam jangka panjang, ketika faktor-faktor produksi di daerah semakin dioptimalkan dalam pembangunan maka perbedaan laju pertumbuhan output antar daerah cenderung menurun. Hal itu ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata di setiap daerah seiring dengan waktu yang berjalan. Kondisi tersebut sesuai dengan hipotesa Kuznet yang dikenal dengan hipotesa U terbalik (*Intervred U hypothesis*), yang menyatakan bahwa ketimpangan wilayah dan tingkat pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang berbentuk U terbalik seiring waktu yang berjalan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah "Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?" Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengklasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi Kalbar berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah;
2. Untuk membuktikan apakah kurva U terbalik dari Kuznet berlaku di Provinsi Kalbar; dan
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Kalbar.

## II. RERANGKA TEORI

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka.

Menurut Bendavid-Val (1991) aktivitas di suatu daerah ditentukan oleh aktivitas basis (sektor basis) sedangkan aktivitas-aktivitas non basis merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh tersebut. Sektor bukan basis merupakan aktivitas-aktivitas pendukung. Bertambah banyaknya kegiatan basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah dan peningkatan permintaan barang dan jasa, sehingga menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan menyebabkan berkurangnya pendapatan yang masuk ke daerah dan turunnya permintaan barang dan jasa dari kegiatan bukan basis. Dengan demikian kegiatan basis berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) di mana setiap perubahannya mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional.

Ketimpangan wilayah adalah konsekuensi logis dari adanya proses pembangunan dan ia akan berubah sejalan dengan tingkat perubahan proses pembangunan itu sendiri. Pola pembangunan dan tingkat ketimpangan dalam pembangunan yang ditemui di beberapa negara tidaklah sama, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda yang dijumpai di negara tersebut, seperti kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, sejarah wilayah tersebut, lokasi dan sebagainya. Adelman dan Moris (1973) mengemukakan delapan penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di negara berkembang, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi yang tidak diikuti dengan peningkatan produksi, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, investasi padat modal, rendahnya mobilitas sosial, kebijakan industri substitusi impor yang menyebabkan kenaikan pada harga barang guna melindungi usaha golongan kapitalis, memburuknya nilai tukar negara berkembang dalam perdagangan dengan negara maju dan hancurnya industri kerajinan rakyat.

Menurut Gie (1983) masalah ketimpangan wilayah dapat ditinjau dari tiga segi yaitu *regional income disparity*, *urban rural income disparity* *size of distribution on income*. Ketimpangan jenis pertama lebih bersifat struktural. Di tengah permasalahan pembangunan yang kian pelik dan beragam di tiap daerah, maka daerah mau tidak mau harus diberikan porsi yang semakin besar untuk mengidentifikasi sendiri permasalahan yang dihadapinya dan merumuskan strategi dan langkah-langkah pemecahannya. Ketimpangan kedua, yakni kesenjangan antar sektor, lebih disebabkan oleh strategi pembangunan yang bias ke sektor perkotaan (*urban bias*) atau ke sektor modern sehingga sektor tradisional dan pembangunan daerah pedesaan relatif tertinggal. Ketimpangan jenis ketiga, yakni ketimpangan pendapatan. Jika pendapatan rata-rata masyarakat secara keseluruhan telah meningkat, namun ini tidak cukup menggembirakan jika diiringi oleh kesenjangan yang meningkat. Apalagi kalau kelompok sosial yang berpendapatan tinggi meraih dan menikmati kekayaan lewat cara-cara yang justru dapat merugikan masyarakat yang berpendapatan lebih rendah.

Menurut Todaro (2006) ketimpangan harus mendapat perhatian karena ketimpangan wilayah yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi aset yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan, inefisiensi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas dan memperkuat kekuatan politis golongan kaya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Sementara menurut Armstrong & Taylor (1993) adanya ketimpangan wilayah yang substansial pada standar hidup menyebabkan timbulnya ketidakpuasan, terutama dirasakan oleh mereka yang standar hidupnya rendah, tingginya tingkat pengangguran, dan terjadinya biaya-biaya ekonomi pada daerah yang berkembang

Fenomena hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan pertama kali diperkenalkan oleh Simon Kuznet tahun 1955 (Arsyad: 2010). Kuznet menemukan bahwa pada awal tahap pertumbuhan, distribusi pendapatan (kesejahteraan) cenderung memburuk. Namun pada tahap berikutnya, distribusi pendapatan tersebut membaik seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita (kurva U terbalik). Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi biasanya terpusat di sektor modern dan terkonsentrasikan di wilayah-wilayah yang sudah maju. Atau dengan kata lain pertumbuhan di wilayah yang sudah maju lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain yang baru berkembang. Pada negara-negara berkembang di mana sektor pertanian masih mendominasi, tingkat ketimpangan yang terjadi justru sangat kecil, namun ketika kemudian terjadi industrialisasi menyebabkan tingkat ketimpangan meningkat.

Hasil studi Williamson tahun 1965 dalam Kuncoro (2004) menemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, ketimpangan wilayah menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah maka ketimpangan berkurang dengan signifikan. Menurut Williamson ketimpangan antar daerah yang semakin membesar disebabkan oleh, pertama adanya migrasi tenaga kerja, migrasi kapita dan adanya pembangunan sarana publik pada daerah yang lebih padat dan potensial. Selain itu kurangnya keterkaitan antar daerah dapat menyebabkan terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang berdampak pada semakin besarnya kesenjangan/ketimpangan yang terjadi. Pembangunan yang selama ini telah menghasilkan pertumbuhan yang cukup tinggi ternyata belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan atau berbagai golongan penduduk seluruh daerah atau dengan kata lain belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan ketimpangan antar daerah

Penelitian Papanek dan Kin (1986) menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih sering dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah, sedangkan Todaro (2006) menjelaskan, laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan. Taiwan dan Korea Selatan mengalami laju pertumbuhan GNP yang tinggi dan distribusi pendapatan yang kian merata. Namun Meksiko dan Panama mengalami laju pertumbuhan yang cepat, tetapi diiringi dengan memburuknya distribusi pendapatan. Kasus lainnya di India, Peru dan Philipina menunjukkan bahwa laju pertumbuhan GNP yang rendah disertai pula dengan memburuknya distribusi pendapatan. Sri Lanka, Kolombia, Kosta Rika dan El Savador walaupun mengalami pertumbuhan yang rendah, namun mereka berhasil memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya

Wei dan Fan (2000) yang melakukan penelitian tentang ketimpangan wilayah di Propinsi Jiangsu RRC, menemukan bahwa pertumbuhan yang cepat di kota-kota menyumbang ketimpangan antar daerah. Sejak bergulirnya reformasi, pertumbuhan bagian selatan (Yunan) bahkan lebih cepat dan memperlebar ketimpangan dibandingkan bagian tengah (Suzhong) dan utara (Subei). Hasil studi Noegroho dan Soelistianingsih (2007) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Tengah berkisar antar 0,5995–0,6605, artinya tidak terdapat perbedaan pendapatan yang terlalu jauh dan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota masih dipandang relatif seimbang. Hasil estimasi dengan data panel menunjukkan bahwa faktor ketimpangan pendapatan, migrasi keluar dan pengeluaran

pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi regional, sebaliknya inflasi regional mempunyai pengaruh yang negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Arbia (2005), tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan antar wilayah di Uni Eropa dan negara-negara transisi Uni Eropa menunjukkan kecenderungan arah hubungan yang positif. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Panizza (2002), menggunakan data indeks Gini menemukan bahwa hubungan antara pertumbuhan dengan distribusi pendapatan tidak signifikan. Sedangkan dengan menggunakan estimasi OLS, hasilnya menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan dengan distribusi pendapatan adalah negatif dan signifikan. Kemudian dengan estimasi *fixed effect* hubungan antara pertumbuhan dengan distribusi pendapatan adalah positif ketika menggunakan *third quintile* dan negatif ketika menggunakan indeks Gini sebagai variabel untuk mengukur distribusi pendapatan. Perbedaan arah hubungan tidak hanya karena perbedaan estimasi atau variabel ketimpangan (distribusi pendapatan), tetapi juga karena perbedaan cakupan periode yang digunakan dalam penelitian. Dengan menggunakan data periode yang lebih pendek, hasil estimasi menunjukkan hubungan positif sedangkan dengan periode yang lebih panjang, arah hubungannya adalah tidak signifikan.

Perbedaan arah hubungan menurut penelitian yang dilakukan oleh Barro (2000), disebabkan oleh perbedaan tingkat pembangunan. Pada daerah-daerah yang memiliki pendapatan tinggi, adanya *imperfect credit market* menyebabkan investasi menurun, maka faktor ketimpangan mendominasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan di daerah-daerah miskin hal tersebut justru memperlambat pertumbuhan ekonomi. Barro juga menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan (ketimpangan) dari beberapa sisi. Dari sisi ekonomi-politik adanya ketimpangan mendorong adanya motivasi untuk meningkatkan upah buruh, yang akhirnya mendorong penurunan investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dari sisi sosial-politik, adanya ketimpangan yang cukup lebar mendorong peningkatan kekecewaan, kriminalitas dan aktifitas pengrusakan lainnya yang kemudian dapat menyebabkan rendahnya produktivitas ekonomi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dari sisi tingkat tabungan, peningkatan ketimpangan mendorong makin meningkatnya investasi (jika ekonomi sebagian tertutup), yang artinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### III. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (*pooled data*) yang merupakan kombinasi antara data runtut waktu dengan data silang tempat. Data panel tersebut meningkatkan jumlah observasi sehingga keterbatasan jumlah observasi dapat teratasi (Kuncoro: 2004). Data yang telah dikumpulkan tersebut akan diolah dengan komputer melalui program *software Economics Views (E-views) Version 4.1*, dengan menggunakan metode GLS (*Generalized Least Squares*) yaitu metode yang mengasumsikan bahwa varian variabel adalah heterogen dan model *fixed effects*.

Untuk menentukan angka ketimpangan wilayah digunakan Indeks Williamson (Kuncoro: 2004) dengan formulasi sebagai berikut.

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 (F_i / n)}}{\bar{y}}$$

Keterangan:

- IW = Indeks Williamson
- $Y_i$  = Pendapatan perkapita kabupaten ke-i
- $Y$  = Pendapatan perkapita Provinsi Kalimantan Barat
- $F_i$  = Jumlah penduduk kabupaten i
- n = Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat

Adapun kriteria hasil yang digunakan adalah:

- Indeks > 1 = ketimpangan sangat tinggi
- Indeks 0,7 – 1 = ketimpangan tinggi
- Indeks 0,4 – 0,69 = ketimpangan sedang
- Indeks < 0,39 = ketimpangan rendah

Untuk menjawab tujuan penelitian pertama yaitu mengklasifikasikan kabupaten/kota berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah digunakan alat analisis *Klassen Tipologi*. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalbar selama sebelas tahun sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB perkapita Kalbar sebagai sumbu horizontal, kondisi masing-masing kabupaten/kota dibandingkan dengan rata-rata Kalbar untuk mengetahui daerah tersebut termasuk kuadran berapa. Kuadran 1 adalah untuk kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan ketimpangan wilayah rendah dibandingkan dengan tingkat rata-rata Provinsi. Kuadran 2 adalah untuk kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun ketimpangan wilayah juga tinggi dibandingkan dengan tingkat rata-rata Provinsi. Kuadran 3 adalah untuk kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi rendah tetapi ketimpangan wilayah juga rendah dibandingkan dengan tingkat rata-rata Provinsi. Kuadran 4 adalah untuk kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan ketimpangan wilayah tinggi dibandingkan dengan tingkat rata-rata Provinsi

**Tabel 2.**  
**Klasifikasi Kabupaten/Kota Menurut**  
**Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah**

|   |   |
|---|---|
| <b>Kuadran 1</b>  | <b>Kuadran 2</b>  |
| Pertumbuhan ekonomi tinggi dan ketimpangan wilayah rendah | Pertumbuhan ekonomi tinggi dan ketimpangan wilayah tinggi |
| <b>Kuadran 4</b>  | <b>Kuadran 3</b>  |
| Pertumbuhan ekonomi rendah dan ketimpangan wilayah rendah | Pertumbuhan ekonomi rendah dan ketimpangan wilayah tinggi |

Untuk menjawab tujuan kedua tentang hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara ketimpangan wilayah yang sudah dihitung dengan Indeks Williamson dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznetz hubungan antara ketimpangan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bentuk U terbalik. Artinya pada masa awal pertumbuhan ketimpangan memburuk (tinggi) dan pada tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya akan menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali.

Untuk menjawab tujuan penelitian ketiga digunakan teknik analisa regresi dengan model yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 x_1 + \epsilon$$

dimana:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- a = Konstanta yang menunjukkan besar nilai y bila nilai  $x_1 = 0$
- $\beta_1$  = Koefisien regresi
- $x_1$  = Ketimpangan Wilayah
- $\epsilon$  = *error term* (residual)

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: Ketimpangan wilayah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Kalbar.

#### IV. PENYAJIAN DATA

##### Klasifikasi Kabupaten/Kota Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah

Berdasarkan jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita kabupaten/kota di Provinsi Kalbar tahun 2001-2010 dapat dihitung ketimpangan wilayah dengan menggunakan indeks Williamson sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 3. Ketimpangan wilayah di Provinsi Kalbar rata-rata sebesar 0,332. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalbar termasuk kategori rendah, dengan kata lain relatif merata dalam hal pendapatan per kapita. Ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Kalbar tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 cenderung turun. Ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu 0,383 dan terus turun menjadi 0,286 pada tahun 2010. Pada tahun 2008 angka ketimpangan sempat meningkat dari tahun sebelumnya, namun tahun 2010 ketimpangan turun kembali. Hal ini menunjukkan ketimpangan wilayah di Kalbar fluktuatif dengan kecenderungan penurunan.

**Tabel 3.**  
**Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah**  
**Provinsi Kalimantan Barat**  
**Tahun 2001 – 2010**

| Tahun            | Ketimpangan Wilayah<br>(Indeks) | Pertumbuhan Ekonomi<br>(%) |
|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2001             | 0.361                           | 3.98                       |
| 2002             | 0.340                           | 4.63                       |
| 2003             | 0.340                           | 4.30                       |
| 2004             | 0.331                           | 4.68                       |
| 2005             | 0.333                           | 4.96                       |
| 2006             | 0.319                           | 5.77                       |
| 2007             | 0.315                           | 5.70                       |
| 2008             | 0.321                           | 5.16                       |
| 2009             | 0.320                           | 4.45                       |
| 2010             | 0.286                           | 5.33                       |
| <b>Rata-rata</b> | <b>0.332</b>                    | <b>4.94</b>                |

*Sumber: Data Olahan, Tahun 2012*

Ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalbar sebenarnya termasuk kategori rendah jika dilihat dari rata-rata antara tahun 2000 hingga tahun 2010. Hanya Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi yang memiliki indeks ketimpangan sebesar 0,2 hampir mendekati angka ketimpangan Kalbar 0,332. Namun angka indeks itupun masih terkategori ketimpangan rendah. Jika dilihat dari rata-rata pendapatan perkapita antar kabupaten/kota memang tidak begitu jauh berbeda dengan pendapatan perkapita rata-rata Provinsi Kalbar, kecuali pendapatan perkapita Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi yang paling rendah dibanding daerah lain dan terpaut jauh dengan pendapatan perkapita rata-rata Provinsi Kalbar. Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Sekadau dan Melawi juga paling sedikit penduduknya, maka angka ketimpangannya menjadi lebih tinggi dibanding daerah lain di Kalbar. Kota Pontianak, meskipun pendapatan perkapita daerahnya paling tinggi di Kalbar, namun karena jumlah penduduknya paling padat maka angka ketimpangannya menjadi kecil (penduduk sebagai pembagi). Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi adalah kabupaten baru hasil pemekaran, dengan ketimpangan yang lebih tinggi dibanding daerah lain di Kalbar, menandakan daerah ini sedang menata

pembangunan daerahnya yang memang relatif tertinggal dibanding daerah lain. Daerah ini juga masih sangat minim fasilitas dan kesejahteraan penduduknya juga relatif rendah.

**Tabel 4.**  
**Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001-2010**

| Kabupaten / Kota  | Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson) Tahun |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Rata-rata    |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                   | 2001  | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         |              |
| Kab. Sambas       | 0.083   | 0.080        | 0.072        | 0.071        | 0.075        | 0.068        | 0.064        | 0.067        | 0.058        | 0.066        | 0.070        |
| Kab. Bengkayang   | 0.131   | 0.124        | 0.082        | 0.088        | 0.080        | 0.075        | 0.070        | 0.047        | 0.048        | 0.071        | 0.081        |
| Kab. Landak       | 0.107   | 0.097        | 0.093        | 0.100        | 0.111        | 0.109        | 0.113        | 0.145        | 0.151        | 0.118        | 0.114        |
| Kab. Pontianak    | 0.077   | 0.083        | 0.071        | 0.078        | 0.087        | 0.083        | 0.077        | 0.073        | 0.080        | 0.077        | 0.078        |
| Kab. Sanggau      | 0.023   | 0.023        | 0.023        | 0.024        | 0.020        | 0.009        | 0.001        | 0.009        | 0.012        | 0.029        | 0.017        |
| Kab. Ketapang     | 0.081   | 0.063        | 0.052        | 0.050        | 0.034        | 0.005        | 0.009        | 0.013        | 0.006        | 0.053        | 0.037        |
| Kab. Sintang      | 0.065   | 0.073        | 0.066        | 0.085        | 0.095        | 0.093        | 0.095        | 0.099        | 0.098        | 0.087        | 0.086        |
| Kab. Kapuas Hulu  | 0.006   | 0.000        | 0.005        | 0.036        | 0.062        | 0.060        | 0.068        | 0.066        | 0.069        | 0.038        | 0.041        |
| Kab. Sekadau      | 0.136   | 0.168        | 0.178        | 0.215        | 0.236        | 0.225        | 0.216        | 0.221        | 0.217        | 0.212        | 0.202        |
| Kab. Melawi       | 0.229   | 0.241        | 0.241        | 0.246        | 0.271        | 0.282        | 0.285        | 0.294        | 0.302        | 0.255        | 0.264        |
| Kab. Kayong Utara | 0.111   | 0.104        | 0.095        | 0.094        | 0.079        | 0.068        | 0.067        | 0.064        | 0.066        | 0.093        | 0.084        |
| Kab. Kubu Raya    | 0.103   | 0.095        | 0.091        | 0.083        | 0.072        | 0.066        | 0.063        | 0.063        | 0.060        | 0.079        | 0.077        |
| Kota Pontianak    | 0.144   | 0.136        | 0.141        | 0.134        | 0.136        | 0.132        | 0.130        | 0.131        | 0.133        | 0.135        | 0.135        |
| Kota Singkawang   | 0.002   | 0.003        | 0.004        | 0.002        | 0.007        | 0.001        | 0.002        | 0.001        | 0.001        | 0.002        | 0.003        |
| <b>Kalbar</b>     | <b>0.361</b>                                  | <b>0.340</b> | <b>0.340</b> | <b>0.331</b> | <b>0.333</b> | <b>0.319</b> | <b>0.315</b> | <b>0.321</b> | <b>0.320</b> | <b>0.286</b> | <b>0.332</b> |

*Sumber: Data Olahan, Tahun 2012*

Secara keseluruhan, tiap tahun hampir selalu terjadi penurunan angka ketimpangan. Tiap daerah berusaha mendorong pertumbuhan ekonominya dengan mengandalkan sektor-sektor unggulan masing-masing daerah, terutama perkebunan Kabupaten Landak, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau dan Melawi memiliki angka ketimpangan yang menunjukkan peningkatan secara fluktuatif. Ada dua kabupaten lama yang termasuk kategori ini, yaitu Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu yang jaraknya dengan ibukota Pontianak termasuk paling jauh. Dua Kabupaten ini bahkan diwacanakan dilebur menjadi Provinsi baru yaitu Provinsi Kapuas Raya mengingat wilayahnya yang masih sangat luas.

Analisis Klassen Tipologi juga dapat dilakukan dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah. Hal ini dilakukan untuk melihat klasifikasi daerah di Kalbar berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah Caranya dengan membandingkan kedua variabel tersebut di masing-masing daerah dengan rata-rata propinsi. Berdasarkan data pada Tabel 5 maka didapat hasil klasifikasi tersebut sebagaimana pada Tabel 6



**Tabel 5.**  
**Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah**  
**Rata-Rata Antar Kabupaten/Kota di Kalbar**  
**Tahun 2001-2010**

| No.                     | Kabupaten/kota    | Ketimpangan Wilayah<br>( Indeks Wiiliamson ) | Pertumbuhan Ekonomi<br>(%) |
|-------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| 1                       | Kab. Sambas       | 0.070  | 4.97                       |
| 2                       | Kab. Bengkayang   | 0.081  | 7.60                       |
| 3                       | Kab. Landak       | 0.114  | 4.06                       |
| 4                       | Kab. Pontianak    | 0.078  | 4.76                       |
| 5                       | Kab. Sanggau      | 0.017  | 4.80                       |
| 6                       | Kab. Ketapang     | 0.037  | 7.81                       |
| 7                       | Kab. Sintang      | 0.086  | 4.79                       |
| 8                       | Kab. Kapuas Hulu  | 0.041  | 3.21                       |
| 9                       | Kab. Sekadau      | 0.202  | 3.23                       |
| 10                      | Kab. Melawi       | 0.264  | 3.87                       |
| 11                      | Kab. Kayong Utara | 0.084  | 6.19                       |
| 12                      | Kab. Kubu Raya    | 0.077  | 4.09                       |
| 13                      | Kota Pontianak    | 0.135  | 4.90                       |
| 14                      | Kota Singkawang   | 0.003  | 4.90                       |
| <b>KALBAR rata-rata</b> |                   | <b>0.092</b>                                 | <b>4.94</b>                |

*Sumber: Data Olahan, Tahun 2012*

Berdasarkan hasil klasifikasi pada Tabel 6 dapat dilihat daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan ketimpangannya rendah adalah Kabupaten Ketapang, Sambas, Bengkayang dan Kayong Utara. Ini berarti pertumbuhan yang tinggi dapat mengurangi ketimpangan wilayah dan dapat dikatakan daerah ini dapat mensejahterakan masyarakatnya, khususnya Kabupaten Ketapang yang memiliki pendapatan perkapita tinggi. Kondisi ini setidaknya sesuai dengan harapan bahwa untuk mengejar pertumbuhan yang tinggi tidak harus selalu diiringi dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah membawa dampak positif bagi daerah sekelilingnya. Hal ini diperkuat pula dengan tidak ditemukannya daerah yang masuk klasifikasi daerah dengan pertumbuhan tinggi namun ketimpangannya juga tinggi. Jika ini terjadi berarti pertumbuhan yang tinggi belum memberi manfaat positif bagi masyarakat daerah tersebut.

Daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah namun ketimpangannya rendah juga adalah Kabupaten Pontianak, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Kubu Raya, dan Kota Singkawang. Walaupun pertumbuhan ekonomi daerah ini tidak begitu tinggi, tapi setidaknya ketimpangan daerah rendah. Namun pertumbuhan yang rendah dalam jangka panjang dikhawatirkan mempertinggi ketimpangan daerah dan menghambat kemajuan daerah sehingga kondisi ini harus dihindari dengan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Hal yang menarik adalah Kabupaten Sanggau, Kubu Raya dan Kota Singkawang meskipun pertumbuhannya rendah tetapi pendapatan perkapitanya tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah ini merata dengan tingkat pendapatan tinggi. Kondisi ini tentu jauh lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Pontianak, Sintang, dan Kapuas Hulu yang pendapatannya relatif merata (ketimpangan rendah) namun tingkat pendapatan tersebut rendah.

Klasifikasi daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah dan ketimpangannya tinggi adalah Kabupaten Landak, Sekadau, Melawi dan Kota Pontianak. Dapat dikatakan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah daerah belum mampu meningkatkan kinerja perekonomiannya dengan segala hambatanya, hal ini akhirnya menyebabkan ketimpangan pun meningkat. Daerah yang paling parah kondisinya adalah Kabupaten Landak, Sekadau, dan Melawi, di mana pertumbuhan ekonominya rendah menyebabkan pendapatan perkapita rendah sehingga ketimpangan dengan daerah lain menjadi tinggi.

Sebaliknya yang menarik pada kuadran ini ada Kota Pontianak di mana sebagai ibukota provinsi pembangunan terfokus pada daerah ini, ternyata membuat ketimpangan daerah ini tinggi dibanding dengan daerah lain di Kalbar tetapi dengan kondisi yang terbalik yaitu timpang dengan pendapatan perkapita yang paling tinggi. Berarti keberadaan Kota Pontianak pada kuadran ini mempunyai makna yang berlawanan dengan Kabupaten Landak, Sekadau dan Melawi dengan pendapatan perkapita yang sangat rendah.

**Tabel 6.**  
**Klasifikasi Kabupaten/Kota Berdasarkan**  
**Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah**

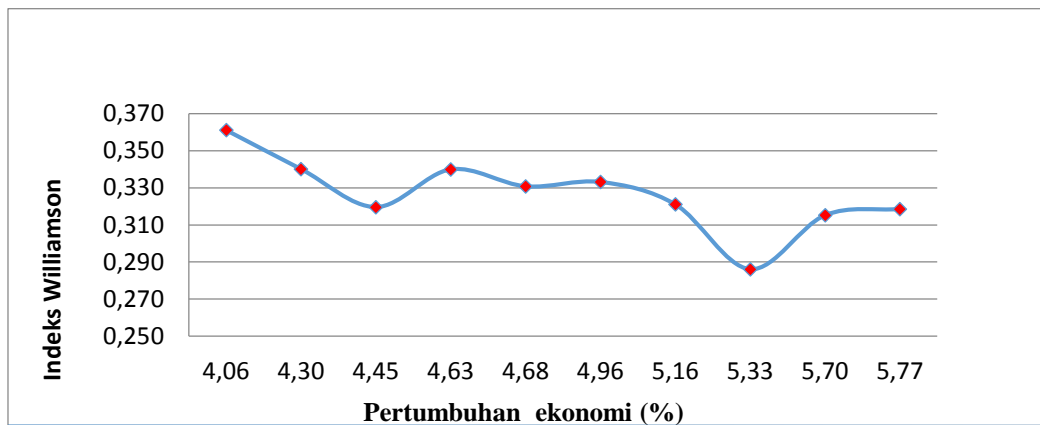
| <b>G</b>         | <b>IW</b> | <b>IWi &gt; IW</b>  | <b>IWi &lt; IW</b>                                       |
|------------------|-----------|---|--|
| <b>Gi &gt; G</b> |           | Kab. Ketapang, Kab. Sambas, Kab. Bengayang dan Kab. Kayong Utara                              | -----  |
| <b>Gi &lt; G</b> |           | Kab. Sanggau, Kab. Pontianak, Kab. Sintang, Kab. Kubu Raya, Kab. Kapuas Hulu, Kota Singkawang | Kab. Landak, Kota Pontianak<br>Kab. Sekadau, Kab. Melawi |

*Sumber: Data Olahan, Tahun 2012*

### **Pembuktian Hipotesis Kuznet**

Hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan membuat grafik hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah yang diukur dengan indeks Williamson. Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa pada pertumbuhan awal distribusi pendapatan cenderung memburuk atau ketimpangan meningkat. Pada tahap berikutnya ketimpangan tersebut akan menurun dan pemerataan produk domestik regional bruto (PDRB) akan dicapai (Todaro, 2006; Kuncoro, 2004). Gambar 1 merupakan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks Williamson yang dibuat berdasarkan Tabel 3. Kurva tersebut menunjukkan bahwa pada pertumbuhan awal ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun. Namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya akan menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut berulang kembali. Ketimpangan paling tinggi pada tahun 2000 yaitu 0.38 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2004. Kemudian ketimpangan meningkat lagi di tahun 2004 hingga tahun 2007. Kemudian ketimpangan meningkat kembali di tahun 2008 hingga tahun 2010. Jika ketimpangan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan penurunan. Maka pertumbuhan menunjukkan trend peningkatan hingga tahun 2007 dan turun pada dua tahun berikutnya. Berdasarkan data pada Tabel 3 memang ketimpangan di Kalbar cenderung mengalami penurunan pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat, oleh karena itu kurva yang terbentukpun tidak persis seperti U terbalik. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets dapat dikatakan tidak berlaku di Provinsi Kalimantan Barat pada periode pengamatan tahun 2001-2010.

**Gambar 1.**  
**Kurva Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi**  
**dengan Indeks Williamson Prov. Kalbar**



Sumber: Data Olahan, Tahun 2012

Dapat dikatakan bahwa di awal pembangunan diperlukan pertumbuhan yang tinggi (syarat perlu), tiap daerah berusaha untuk meningkatkan PDRB nya dengan mengandalkan sektor unggulan daerah, padahal kondisi antar daerah di Kalimantan Barat umumnya tidak memadai dalam hal infrastruktur, kecuali daerah perkotaan. Beberapa daerah mengandalkan sektor perkebunan sebagai primadona sehingga pertumbuhannya pesat. Namun pesatnya pertumbuhan pada beberapa daerah tidak sebanding dengan kesejahteraan rakyat, di mana akses masyarakat dalam pelayanan publik masih sangat terbatas. Jika kita teliti, justru daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya tidak stabil dalam pertumbuhannya, cenderung berfluktuatif sangat tajam.

Jika semua daerah telah berhasil mengoptimalkan potensinya, maka pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak begitu mencolok perbedaannya termasuk dalam hal pendapatan perkapita yang semakin merata antar daerah, dengan demikian ketimpangan antar wilayah semakin menyempit. Namun jika ada daerah yang lebih cepat lagi dalam pertumbuhannya maka ketimpangan terjadi lagi sampai daerah lain akan berusaha mengejar ketertinggalannya. Satu hal yang lebih penting lagi bagi Kalbar adalah walaupun ketimpangan antar wilayah termasuk rendah (dengan kata lain kondisi antar daerah relatif merata), namun pemerataan itu berada pada tingkat pendapatan perkapita yang rendah pula sehingga masih jauh untuk mensejahterakan masyarakatnya

### Pengaruh Ketimpangan Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Tabel 7 maka model yang digunakan dituliskan kembali sebagai  $IW = 5.112756 + (-3.653257) G$ . Secara statistik dapat dikatakan bahwa dengan konstanta sebesar 5.112756 berarti jika pertumbuhan ekonomi tidak mengalami peningkatan sama sekali (0) maka ketimpangan wilayah yang terjadi adalah 5.112756. Koefisien regresi untuk pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -3.653257 artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka ketimpangan wilayah mengalami penurunan sebesar -3.653257.

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Model**

| Variabel   | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Probability |
|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| C          | 5.112756    | 0.206481   | 24.76137    | 0.0000      |
| G (Growth) | -3.653257   | 1.640765   | -2.226558   | 0.0279      |

|                    |          |                    |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared          | 0.803862 | Mean dependent var | 8.950979 |
| Adjusted R-squared | 0.802200 | S.D. dependent var | 6.145831 |
| S.E. of regression | 2.733343 | Sum squared resid  | 881.5973 |
| F-statistic        | 483.6167 | Durbin-Watson stat | 1.493786 |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000 |                    |          |

*Sumber: Data olahan, 2012*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pertumbuhan ekonomi ternyata memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan wilayah artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka ketimpangan wilayah mengalami penurunan demikian pula sebaliknya. Pada tahap awal pembangunan setiap daerah berupaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonominya. Namun pertumbuhan yang dicapai tiap daerah tidak sama disebabkan beberapa hal misalnya karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, juga tenaga kerja yang terampil. Akibatnya terjadi ketimpangan antar daerah. Selain faktor-faktor di atas. Penyebab ketimpangan wilayah antara lain adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah. Perbedaan sumber daya alam (SDA). Perbedaan kondisi geografis antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar propinsi. Mengenai faktor kurang lancarnya perdagangan antar propinsi dapat disebabkan oleh kurang memadainya infrastruktur. Selain itu faktor infrastruktur juga sangat berpengaruh pada kinerja perdagangan luar negeri (ekspor-impor).

Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah merupakan fungsi dari waktu. Pada tahap awal pembangunan. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar antar daerah telah mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar daerah. Namun dalam jangka panjang. Ketika faktor-faktor produksi di daerah semakin dioptimalkan dalam pembangunan maka perbedaan laju pertumbuhan output antar daerah akan cenderung menurun. Hal itu ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata di setiap daerah seiring dengan waktu yang berjalan. Ketimpangan antar wilayah di Provinsi Kalbar sebenarnya termasuk rendah, dengan kata lain tingkat pendapatan perkapita antar daerah hampir merata. Namun yang perlu digarisbawahi adalah pemerataan tersebut terjadi pada tingkat pendapatan perkapita yang rendah, sehingga kondisi ketimpangan yang rendah tersebut sebenarnya tidak menggambarkan kesejahteraan masyarakat sepenuhnya.

#### IV. Penutup

Angka ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2001-2010 rata-rata sebesar 0,332. Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, dengan kata lain antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat relatif merata dalam hal pendapatan per kapita. Namun yang perlu digarisbawahi adalah pemerataan tersebut terjadi pada tingkat pendapatan perkapita yang rendah, sehingga kondisi ketimpangan yang rendah tersebut sebenarnya tidak menggambarkan kesejahteraan masyarakat sepenuhnya. Ketimpangan antar kabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 cenderung turun. Nilai Indeks Williamson pada tahun 2001 yaitu dari 0.383 turun menjadi 0.286 pada tahun 2010. Ketimpangan di Kalbar cenderung mengalami penurunan pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat, oleh karena itu kurva yang terbentukpun tidak persis seperti U terbalik. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets dapat dikatakan tidak berlaku di Provinsi Kalimantan Barat pada periode pengamatan tahun 2001-2010

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan wilayah artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka ketimpangan wilayah berkurang demikian sebaliknya. Ini menandakan pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu untuk membangun daerah tetapi bukan

syarat cukup. Karena ada faktor lain yang sangat penting yaitu bagaimana dengan pembangunan tersebut membuat masyarakat daerah menjadi jauh lebih sejahtera dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Pembangunan juga diprioritaskan pada daerah relatif tertinggal. Terutama dalam hal penyediaan pelayanan publik agar kesenjangan antar daerah kota dan kabupaten tidak semakin lebar. Orientasi pembangunan tidak semata berorientasi pada mengejar pertumbuhan yang tinggi tetapi juga harus mempertimbangkan pemerataan dan kesejahteraan.

## REFERENSI

- Adelman. I. & C.T Morris. (1973). *Economic growth and Social equity in developing countries*. California: Standford U.P.
- Arbia. G. Laura de Dominicis. Gianfranco Piras. (2005). *Regional Growth and Regional Inequality in EU and Transition Countries: a Spatial Econometric Approach*. 45th Congress of the European Regional Science Association 23-27 August 2005. Amsterdam.
- Armstrong. Harvey and Taylor. Jim (1993). *Regional Economics and Policy*. Second edition. Great Britain: T.J Press (Padstow) Ltd.
- Arsyad. Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: YKPN
- Barro. Robert J. (2000). *Inequality and growth in a panel of countries*. *Journal of Economic Growth*. 5. 87–120.
- Bendavid-Val, Avrom. (1991). *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*. 4th edition, Connecticut: Praeger
- Kuncoro. Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi. Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Noegroho, Yoenanto Sinung, Soelistianingsih. Lana. (2007). Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional. Papper disajikan dalam Parallel Session IVA: Urban & Regional 13 Desember 2007. Jam 13.00-14.30 Wisma Makara. Kampus UI – Depok.
- Panizza, Ugo. (2002). *Income Inequality and Economic Growth: Evidence from American Data*. *Journal of Economic Growth*. Vol. 7(1). pp. 25-41.
- Papanek. Gustav and Oldrich Kyn. 1986. *The Effect on Income Distribution of Development. The growth Rate and Economic Strategy*. *Journal of Development Economic*. Vol. XX. 55-65
- Sjafrizal. (1997). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma. Nomor 3 tahun XXVI. 34-52. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Gie, The Liang. (1983). *Pertumbuhan Pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia*. Jilid II. Yogyakarta: Liberty
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.